

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah
Hari, Tanggal	: Senin, 16 Juni 2014
Pukul	: 12.15 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembukaan 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India</i>); 3. Penandatanganan Naskah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India</i>); 4. Pengambilan Keputusan untuk Melanjutkan pada Pembicaraan Tk. II 5. Penutup
Hadir	: orang dari 45 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah	: 1. Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, 2. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM) pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Komisi I DPR RI melalui Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi bersama-sama dengan Pemerintah memutuskan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*) untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UndangUndang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB

Jakarta, 16 Juni 2014

KETUA RAPAT,

Dr. TB HASANUDDIN, SE, MM
A-350